

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KETIMPANGAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI KAWASAN CIAYUMAJAKUNING

Anggun Ciptasari Nurana
anggun.ciptasari@gmail.com

Lutfi Muta'ali
luthfimutaali@yahoo.co.id

Abstract

The study purposes are to identify the level partiality expansion of region development during 1995-2009, the effects of realization of regional autonomy toward the partiality expansion, and the factors which influenced the partiality in Ciayumajakuning. The data analysis used entropi theil index, wilcoxon test, and regression test of panel data. The results showed the fluctuation of the partiality expansion in region development had happened during 1995-2009, theil total score area's had tend to increase yearly. There was no significant effect of regional autonomy toward the equalization/degradation of partiality of region development in Ciayumajakuning. Wilcoxon test result is 0,05 for each region & 0,028 for total theil Ciayumajakuning, but they don't indicate the equality. Regression test of panel data showed the ratio variable of the expense construction had negative relationship with the partiality level of region development and the workers variable had positive relationship with it.

Keywords: The autonomy, partiality, development

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah tahun 1995-2009, mengidentifikasi pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan di Kawasan Ciayumajakuning. Analisis pada data menggunakan indeks entropi theil, uji wilcoxon dan uji regresi data panel. Hasil penelitian menunjukan terjadi fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama 1995-2009 dengan nilai total theil kawasan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya. Tidak terdapat pengaruh signifikan dari pelaksanaan otonomi daerah terhadap pemerataan/penurunan ketimpangan perkembangan wilayah dengan hasil uji wilcoxon sebesar 0,500 pada masing-masing daerah dan 0,028 untuk total theil Ciayumajakuning, namun keduanya tidak mengindikasikan pemerataan. Hasil uji regresi data panel menunjukan bahwa variabel rasio belanja pembangunan memiliki pengaruh signifikan dan negatif dengan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah dan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ketimpangan perkembangan yang terjadi.

Kata kunci: Otonomi, Ketimpangan, Perkembangan

PENDAHULUAN

Krisis moneter serta ambruknya perekonomian memicu perlawanan terhadap pemerintahan orde baru pada awal tahun 1998 untuk menuntut reformasi yang nyata, demokrasi dan desentralisasi. Gelombang reformasi tersebut menjadi pendorong disahkannya kerangka hukum baru mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah yang dituangkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999.

Melalui UU No. 22 Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik atau *good governance*. Otonomi daerah memberi hak serta wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat konsep desentralisasi dalam kebijakan otonomi daerah yang merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Tuntutan reformasi akan keadilan dalam bidang ekonomi bagi masyarakat daerah diwujudkan dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerahnya melalui prinsip *money follos functions* (Bahl, 2000:19). Kebijakan ini diperkuat oleh UU No. 25 Tahun 1999 yang mengalami perubahan menjadi UU No. 33 Tahun 2004.

Kebijakan desentralisasi fiskal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah mampu menjalankan fungsinya dengan baik serta dapat mendukung dan meningkatkan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Saragih, 2003). Pelimpahan wewenang dalam pengelolaan keuangan menuntut pemerintah daerah agar dapat mandiri yang berarti bahwa dapat menggali potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah serta dapat mengelola keuangan untuk melaksanakan pemerintahannya.

Pelaksanaan otonomi daerah dimulai pada bulan Januari tahun 2000 sedangkan untuk

kebijakan desentralisasi fiskal sendiri baru dimulai pada tanggal 1 Januari tahun 2001. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Sehingga dengan adanya otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih pemeratakan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah.

Menurut Halim dalam Erlangga A. Landiyanto (2005), ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan suatu otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk mengelola pemerintahan; (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin.

Pengalihan otoritas pengelolaan daerah dari pemerintah pusat ke daerah ternyata tidak dapat dilakukan di semua daerah, begitu juga dengan kemandirian penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah. Hal ini berhubungan dengan potensi serta sumberdaya yang terdapat di daerah otonom, dimana karakteristik masing-masing daerah mempengaruhi potensi serta sumber daya yang terdapat di dalamnya. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya perbedaan kemampuan finansial pada masing-masing daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai dampak dari penyelenggaraan kebijakan otonomi daerah tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui peran otonomi daerah sebagai katalisator pemerataan.

Dampak penerapan konsep desentralisasi fiskal pada pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah juga dirasakan pada Kawasan Ciayumajakuning yang merupakan satu dari empat Bakorwil (badan koordinator wilayah) yang berada di Jawa Barat dengan nama Bakorwil Cirebon.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih selama sebelas tahun, yaitu mulai tahun 2001 sampai saat ini, masih mengalami kasus klasik yakni, pelaksanaan desentralisasi secara signifikan menumbuhkan ekonomi regional tiap kabupaten/kota, namun di sisi lain ketimpangan juga terjadi antar kabupaten/kota di kawasan Ciayumajakuning tidak mengalami perubahan

yang signifikan untuk menuju pemerataan. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak otonomi daerah terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning ini bertujuan untuk mengidentifikasi:

1. Tingkat kesenjangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning,
2. Pengaruh pelaksanaan kebijakan Otonomi Daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning,
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan wilayah pada pelaksanaan kebijakan otonomi daerah.

Landasan teori dalam penelitian ini yakni berikut :

1. Ilmu Geografi

Penerapan ilmu geografi dalam menjawab tantangan pembangunan di Indonesia salah satunya yaitu melalui peran ilmu geografi dalam pengembangan wilayah (Baiquni, 2004). Terdapat tiga pendekatan dalam ilmu geografi yakni analisis keruangan (*spatial analysis*), analisis ekologi (*ecological analysis*), dan analisis kompleks wilayah (*regional complex analysis*). Ketiga pendekatan geografi tersebut mendasarkan pada aspek keruangan yang mempunyai kaitan erat dengan persebaran suatu obyek pembahasan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kompleks wilayah untuk melihat berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan wilayah di Ciayumajakuning dalam kaitannya dengan keruangan wilayah. Pendekatan kompleks wilayah menelaah gejala atau fenomena dengan menggunakan kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi.

2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pemberian otonomi daerah yaitu untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan (Kuncoro, 2004)

3. Hubungan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan mengenai otonomi daerah tentunya diiringi dengan adanya asas desentralisasi. Desentralisasi merupakan pengotonomian, yakni proses memberikan otonomi kepada masyarakat dalam wilayah tertentu. Kaitan desentralisasi dan otonomi daerah seperti yang diungkapkan oleh Gerald S. Maryanow (2003) yaitu merupakan dua sisi dari satu mata uang.

Desentralisasi tersebut tentunya mencakup penyerahan wewenang dalam mengelola keuangan daerahnya. Sehingga salah satu konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yakni adanya kebijakan desentralisasi fiskal.

4. Perkembangan Wilayah

Perkembangan wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan & menyeimbangkan pembangunan nasional dan kesatuan wilayah nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Perkembangan suatu wilayah terkait dengan potensinya dan optimalisasi pemanfaatan potensi tersebut. Teori perkembangan wilayah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori klasik, teori neo-klasik, teori sektor dan teori tahap pembangunan.

5. Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Fenomena dibalik pertumbuhan wilayah seperti kesenjangan antar wilayah menjadi masalah mendasar pembangunan. Ketimpangan wilayah menurut Forbes (1986) menyangkut ketimpangan secara ekonomi dan ketimpangan secara sosial. Ketimpangan ekonomi lebih mengacu pada distribusi

pendapatan per kapita daerah yang kurang merata sedangkan ketimpangan sosial lebih mengacu pada akibat dari terjadinya ketimpangan ekonomi.

Perbedaan perkembangan dan kemajuan antar wilayah yang berarti tidak samanya kemampuan untuk bertumbuh yang analog dengan kesenjangan sehingga yang timbul adalah ketidakmerataan sehingga muncul pendapat dan studi-studi empiris yang menempatkan pemerataan dan pertumbuhan pada posisi yang dikotomis. Teori ketimpangan wilayah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *trickling down effect* dan *polarization Effect*, teori *spread effect*, dan Hipotesis Kuznets.

6. Peran Desentralisasi dalam Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Fenomena ketimpangan merupakan konsekuensi logis dari orientasi pembangunan dalam era otonomi daerah yang cenderung mengarah pada alokasi sumberdaya yang terdapat pada wilayah-wilayah pertumbuhan Tjokrowinoto (1999). *Differensiasi* karakteristik wilayah mengakibatkan adanya perbedaan potensi sumberdaya yang dimiliki wilayah tersebut, hal ini juga didorong oleh perbedaan kualitas sumberdaya manusia yang ada di berbagai wilayah.

Menurut Pose et al (2007), terdapat banyak literatur yang menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan dan keuntungan ekonomi. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemerintah daerah (dengan asumsi lebih dekat dengan rakyat) lebih cakap dalam membuat kebijakan yang menentukan barang publik yang dibutuhkan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah menghasilkan fungsi alokasi yang lebih efisien. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ebel dan Yilmaz (2002), Slinko (2002), dan Vasquez dan Mc Nab (2001).

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini berupa data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka dan teknik dokumentasi

data yang berasal dari instansi-instansi pemerintahan Propinsi Jawa Barat dan kawasan Ciayumajakuning. Data sekunder pada penelitian ini berbentuk *time series* (1995-2009) lima daerah di Kawasan Ciayumajakuning yakni Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, Kab. Kuningan dan Kota Cirebon.

Definisi Operasional Variabel

▪ Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Ketimpangan wilayah secara ekonomi menurut Forbes (1986) yakni kondisi ketimpangan yang mengacu pada distribusi pendapatan per kapita daerah yang kurang merata. Ketimpangan perkembangan wilayah mengacu pada kemajuan masing-masing wilayah berdasarkan pendapatan perkapita wilayahnya. Pada penelitian ini, untuk mengukur ketimpangan perkembangan wilayah digunakan perhitungan indeks entropi theil.

▪ Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian sebagai tingkat perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dan kemakmuran masyarakat meningkat.

▪ Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi dalam penelitian ini didapatkan dengan menggunakan pendekatan penerimaan, yaitu mengukur derajat desentralisasi fiskal dari *share* penerimaan daerah terhadap total penerimaan daerah

▪ Rasio Belanja Pembangunan

Rasio belanja pembangunan dalam hal ini merupakan rasio realisasi pengeluaran pemerintah daerah untuk belanja modal pembangunan atau pengeluaran diluar belanja pegawai dalam satu tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah terhadap total belanja daerah.

▪ Indeks Pembangunan Manusia

Mutu sumberdaya manusia dapat diukur dengan menggunakan proxy indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah suatu indikator pembangunan manusia yang diperkenalkan UNDP pada tahun 1990.

▪ Tenaga Kerja

Tenaga Kerja (TK) digunakan untuk mewakili resource yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan suatu wilayah. Dalam

penelitian ini jumlah tenaga kerja yang dimaksud diukur dari jumlah angkatan kerja per tahun, per wilayah.

Analisis Data

Analisis Identifikasi Tingkat Ketimpangan Perkembangan di Kawasan Ciayumajakuning

Analisis identifikasi terhadap tingkat ketimpangan wilayah di Ciayumajakuning dilakukan melalui tahap identifikasi pola dan struktur perkembangan wilayah serta tahap perhitungan tingkat ketimpangan wilayah.

1. Tipologi Klassen

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*) (Kuncoro dan Aswandi, 2002: 27-45) dan (Radianto, 2003: 479-499).

2. Indeks Entropi Theil

Indeks entropi theil digunakan untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan di Ciayumajakuning selama kurun waktu tahun 1995 hingga 2009. Rumus dari Indeks Entropi Theil yakni:

$$I = \sum \frac{y_j}{Y} \times \log \frac{y_j/Y}{x_j/X}$$

Keterangan :

- I(y) = Indeks Entropi Theil
- y_j = PDRB per kapita wilayah j
- Y = rata-rata PDRB per kapita wilayah
- x_j = jumlah penduduk wilayah j
- X = jumlah penduduk propinsi

Indeks entropi theil memiliki kemampuan untuk membedakan ketimpangan antar daerah (*inter region*) dan ketimpangan dalam suatu daerah (*intra region*). Maka, untuk mengukur ketimpangan dalam suatu daerah dan antar daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{intra} = \sum \frac{y_i}{Y_j} \times \log \frac{y_i/Y_j}{x_i/X_j}$$

Keterangan :

- I_{intra}* = Indeks Entropi Theil *intra region*
- y_i = PDRB per kapita daerah i
- Y_j = Jumlah PDRB per kapita kawasan j
- x_i = jumlah penduduk daerah i
- X_j = jumlah penduduk kawasan j

$$I_{inter} = \sum Y_j \times \log \frac{Y_j}{X_j}$$

Keterangan :

- I_{inter}* = Indeks Entropi Theil *inter region*
- Y_j = Rata-rata PDRB per kapita kawasan j
- X_j = Jumlah penduduk kawasan j

Nilai total ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning adalah sebagai berikut :

$$I_{total} = I_{intra} + I_{inter}$$

Analisis Identifikasi Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Pelaksanaan Otonomi Daerah disinyalir mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerataan perkembangan wilayah. Data yang analisis untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan otonomi daerah terhadap ketimpangan perkembangan wilayah tidak memenuhi asumsi klasik maka analisis yang dilakukan menggunakan statistik non parametrik dengan uji wilcoxon.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Perkembangan Wilayah pada Pelaksanaan Otonomi Daerah

Ketimpangan perkembangan selama pelaksanaan otonomi daerah di Kawasan Ciayumajakuning tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor baik yang berupa faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi. Metode yang dapat digunakan untuk mengetahui faktor-faktor tersebut beserta pengaruhnya yaitu analisis regresi data panel dengan menggunakan *software Eviews 6.0*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Identifikasi Tingkat Ketimpangan Perkembangan di Kawasan Ciayumajakuning

1. Profil Perkembangan Ekonomi

Profil perkembangan ekonomi kawasan dapat menggambarkan berbagai karakteristik kegiatan ekonomi yang berbeda pada masing-masing daerah yang terjadi setiap tahunnya.

Tabel 1 Klasifikasi Perkembangan Kawasan Ciayumajakuning Th 2000

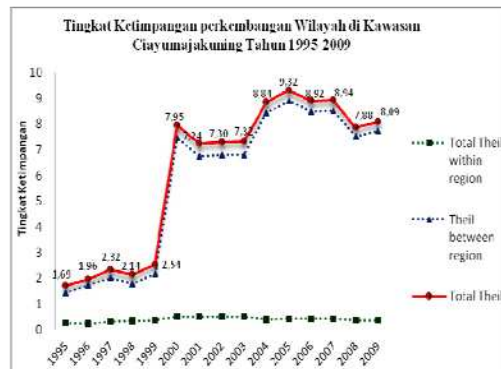
PDRB Perkapita LPE	Y-tumbuh Yt	
	Daerah Kawasa	Daerah Kawasa
F- Daerah Kawasa	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh:	Daerah berkembang cepat: Kab. Majalengka, Kab. Cirebon
F- Daerah Kawasa	Daerah yang agak tertinggal:	Daerah relatif tertinggal: Kab. Indramayu, Kab. Kuningan

Tabel 2 Klasifikasi Perkembangan Kawasan Ciayumajakuning Th 2009

PDRB Perkapita LPE	Y-tumbuh Yt	
	Daerah Kawasa	Daerah Kawasa
F- Daerah Kawasa	Daerah cepat maju dan cepat tumbuh: Kab. Cirebon	Daerah berkembang cepat: Kab. Majalengka, Kab. Cirebon, Kab. Kuningan
F- Daerah Kawasa	Daerah yang agak tertinggal: Kab. Indramayu	Daerah relatif tertinggal:

2. Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning

Differensiasi perkembangan pada masing-masing wilayah pada masa otonomi akan mendorong terjadinya ketimpangan perkembangan di Kawasan Ciyumajakuning. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi mengenai ketimpangan perkembangan yang bersifat *time series* di Kawasan Ciayumajakuning, yakni sebelum dan sesudah otonomi daerah.



Grafik tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning menggambarkan fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan yang terjadi selama kurun waktu tahun 1995 hingga tahun 2009. Tingkat ketimpangan perkembangan wilayah yang terjadi cenderung mengalami kenaikan pada tiap tahunnya.

Analisis Identifikasi Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Seiring dengan garis besar tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi, yakni mengenai efisiensi, keadilan, kemandirian dan pemerataan maka aspek pemerataan atau pengurangan tingkat ketimpangan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi sangat penting untuk diperhatikan. Sehingga pelaksanaan kebijakan otonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah yang terjadi.

Hasil uji wilcoxon untuk tingkat ketimpangan perkembangan masing-masing daerah di Ciayumajakuning tahun 2000 dan 2009 menunjukkan tidak terdapat perbedaan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan otonomi daerah terhadap penurunan tingkat ketimpangan perkembangan (pemerataan) dengan nilai sig sebesar 0,500.

Tabel 3 Hasil Uji Wilcoxon Ketimpangan Perkembangan Masing-masing Daerah
Test Statistics^b

	TkKetimpangan2009 - TkKetimpangan2000
Z	-,674 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,500

a. Based on positive ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Grafik 1 Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Ciayumajakuning Tahun 95-09

Sedangkan hasil uji wilcoxon untuk tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di

Kawasan Ciayumajakuning menunjukkan terjadi terjadi perbedaan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah sebelum dan sesudah otonomi dengan nilai signifikansi sebesar 0,028. Namun tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari kebijakan otonomi daerah terhadap penurunan tingkat ketimpangan perkembangan (pemerataan) dikarenakan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah cenderung naik pasca otonomi daerah.

Tabel 4 Hasil Uji Wilcoxon Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Ciayumajakuning
Test Statistics^b

	sesudah - sebelum
Z	-2,201 ^a
Asymp. Sig. (2-tailed)	,028

a. Based on negative ranks.

b. Wilcoxon Signed Ranks Test

Kedua hasil uji wilcoxon ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terhadap pemerataan perkembangan wilayah yang terjadi di Kawasan Ciayumajakuning.

Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Perkembangan Wilayah pada Pelaksanaan Otonomi Daerah

Hasil analisis regresi data panel menggunakan *software Eviews 6.0* terhadap variabel laju pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi, rasio belanja pembangunan, tenaga kerja dan indeks pembangunan manusia menunjukkan bahwa terdapat dua variabel independent yang signifikan mempengaruhi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Ciayumajakuning selama kurun waktu tahun 2001 hingga 2009, yakni variabel rasio belanja pembangunan dan tenaga kerja.

Tabel 5 Hasil Regresi Data Panel

Variabel	Sig	$\alpha = 0,05$	Kesimpulan
LPE	0.2154	0,05	Tdk Sigifikan
DF	0.8506	0,05	Tdk Sigifikan
RPEM	0.0243	0,05	Sigifikan
IPM	0.1902	0,05	Tdk Sigifikan
LTK	0.0029	0,05	Sigifikan

Interpretasi Hasil Analisis Regresi Data Panel

- Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Hasil analisis regresi data panel terhadap LPE yakni sebesar 0,2154 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga LPE tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah yang terjadi. Hubungan pengaruh LPE terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah yaitu sebesar 0,022264 yang berarti bahwa peningkatan LPE sebesar 0,022264 akan meningkatkan ketimpangan wilayah sebesar 1%. Hal ini sejalan dengan penelitian Altito (2010) dimana pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan ketimpangan wilayah.

- Derajat Desentralisasi terhadap Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Desentralisasi yang merupakan konsep bawaan dari kebijakan otonomi yang telah diterapkan sejak tahun 2001 menunjukkan pengaruh yang kurang signifikan terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di kawasan Ciayumajakuning dengan nilai probabilitas $>0,005$ yakni 0,8506. Nilai koefisien derajat desentralisasi yakni sebesar -0,003054 yang berarti bahwa peningkatan derajat desentralisasi fiskal sebesar 0,003054 akan menyebabkan penurunan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning sebesar 1%. Berdasarkan hasil uji regresi data panel tersebut maka variabel DF berpengaruh tidak signifikan secara negatif terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning. Hal ini sejalan didukung oleh penelitian tahun 2010 yang dilakukan di Jawa Barat oleh Altito bahwa derajat desentralisasi berhubungan negatif dengan tingkat ketimpangan wilayah.

- Rasio Belanja Daerah terhadap Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Berdasarkan hasil uji regresi data panel diketahui bahwa nilai probabilitas variabel rasio belanja pembangunan menunjukkan nilai 0,024 dimana nilai ini lebih kecil dari nilai α yaitu sebesar 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel rasio pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning. Nilai koefisien RPEM sebesar -0,009420 menunjukkan bahwa peningkatan nilai rasio belanja pembangunan

sebesar 0,009420 akan mendorong penurunan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah sebesar 1%.

Perbedaan masing-masing kebijakan dalam pengelolaan belanja daerah atau pengeluaran daerah tentunya berpengaruh terhadap strategi dalam pengelolaan keuangan bagi pembangunan daerah, hal ini dapat mendorong terjadinya perbedaan tingkat perkembangan yang terjadi. Strategi pengelolaan keuangan daerah yang baik terutama dalam pengaturan anggaran belanja daerah akan menjadi modal bagi pembangunan daerah dimana dominasi anggaran belanja daerah tidak lagi berada di pos belanja bagi gaji pegawai tetapi lebih pada pembelian modal dan pembangunan.

- Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah

IPM yang memiliki peranan vital dalam pembangunan ekonomi merupakan suatu modal wilayah melaksanakan proses pembangunan tersebut. Terutama di era otonomi yang memberi keleluasaan daerah untuk mengelola pemerintahannya termasuk pembangunan di dalamnya.

Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari variabel IPM yakni sebesar 0,1902. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning. Hasil uji analisis data panel tersebut juga menggambarkan bahwa setiap kenaikan IPM sebesar 0,028679 akan mendorong penurunan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah sebesar 1%.

- Tenaga Kerja terhadap Tingkat Ketimpangan Perkembangan Wilayah

Menurut Solow dan Swan, bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal) serta tingkat kemajuan teknologi. Teori Fungsi Produksi Neo-Klasik (Sukirno, 2004), juga menjelaskan bahwa tenaga kerja akan mempengaruhi pertumbuhan produksi, dimana peningkatan marginal jumlah tenaga kerja akan meningkatkan marginal produksi.

Nilai probabilitas hasil uji regresi data panel variabel LTK yakni sebesar 0,0029. Nilai probabilitas variabel LTK lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel LTK di Kawasan Ciayumajakuning memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependennya yaitu tingkat ketimpangan perkembangan wilayah. Sehingga peningkatan nilai Tenaga kerja sebesar 1,285100 akan mendorong kenaikan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah sebesar 1%. Berdasarkan hasil uji regresi data panel tersebut maka variabel LTK memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Ciayumajakuning.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan tentang dampak otonomi daerah terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni :

1. Selama kurun waktu tahun 1995 hingga tahun 2009 telah terjadi fluktuasi tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning yang cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya.
2. Kebijakan otonomi daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemerataan atau penurunan tingkat ketimpangan perkembangan wilayah yang terjadi di Kawasan Ciayumajakuning. Tidak terdapat perbedaan tingkat ketimpangan perkembangan masing-masing wilayah yang sebelum dan sesudah otonomi dengan hasil uji wilcoxon sebesar 0,500, sedangkan pada total theil di Kawasan Ciayumajakuning terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah yang ditunjukkan oleh hasil uji wilcoxon yakni sebesar 0,028 namun tidak menunjukkan terjadinya pemerataan.
3. Faktor-faktor yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Kawasan Ciayumajakuning selama otonomi daerah yakni variabel rasio belanja pembangunan dan variabel tenaga kerja.
4. Variabel rasio belanja pembangunan memiliki pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap tingkat ketimpangan

perkembangan wilayah dengan nilai probabilitas sebesar 0,0243.

5. Variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di Ciayumajakuning dengan nilai probabilitas sebesar 0,0029.
6. Faktor-faktor yang tidak signifikan terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah selama pelaksanaan otonomi di Kawasan Ciayumajakuning yakni laju pertumbuhan ekonomi, derajat desentralisasi dan indeks pembangunan manusia.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh serta analisis terhadap hasil dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Peran serta desentralisasi fiskal dalam otonomi daerah seharusnya lebih dimaksimalkan sehingga daerah dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efisien yang didukung dengan sumber-sumber keuangan yang memadai guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah yang mendorong perkembangan wilayahnya.
2. Pemerintah daerah seharusnya melakukan evaluasi pemanfaatan potensi daerah baik berupa komoditas unggulan, pajak, retribusi, sumberdaya yang dimiliki dan sebagainya agar pemanfaatannya optimal sebagai sumber pendapatan daerah. Evaluasi digunakan untuk melakukan peningkatan kualitas dari potensi yang dimiliki serta sebagai pengontrol terhadap pemanfaatannya.
3. Pemberian dukungan pada pengembangan ekonomi lokal baik berupa modal, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung serta pembekalan keterampilan bagi masyarakat guna meningkatkan pendapatan daerah serta mendorong kemandirian daerah agar tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
4. Perlunya dilakukan perancangan strategi pengalokasian pengalokasian dana transfer dan belanja daerah secara efektif dan efisien agar penggunaan sumber dana bukan hanya untuk pengeluaran administrasi namun lebih

ditekankan pada pengeluaran pembangunan dan modal.

5. Pembangunan tidak hanya ditekankan pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi tetapi harus memperhatikan pembangunan manusia didalamnya, sehingga kualitas hidup masyarakat lebih terjamin dengan adanya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baiquni, M. (2004). *Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran-Otonomi di Wilayah Kepulauan*. Yogyakarta : Ide As dan PKPEK.
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz (2002). *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. World Bank Institute. Available: <http://www.worldbank.org>
- Forbes (1986). *Geografi Keterbelakangan (Sebuah Survei Kritis)*. Jakarta : LP₃ES.
- Kuncoro, Mudrajad (2002). *Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Yogyakarta: Erlangga
- Landiyanto, Erlangga Agustino (2005). *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Cures Working Paper, No. 05/01.
- Moeljarto, Tjocrowinoto (1999). *Pembangunan Dilema dan Tantangan* . Yogyakarta : pustaka pelajar
- Pose et all. (2007). *Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth*. Department Of Geography and Environmental, London School of Economics. Available: <http://www.iza.org>

Saragih, P.J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Slinko, Irina (2002). *Fiscal Decentralization on The Budget Revenue Inequity among Munipacalities and Growth Russian Regions*. Available:

<http://www.econpapers.repec.org>

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.